

IDENTITAS DAN MARJINALISASI: ORANG KUBU, ORANG RIMBA, SUKU ANAK DALAM¹

Riwanto Tirtosudarmo

Peneliti LIPI tahun 1980-2017

Email: tirtosudarmo@yahoo.com*

ABSTRAK

Tulisan ini melalui berbagai literatur yang tersedia, menelusuri dan memproblematisasi pergeseran identitas sosial-kultural sebuah kelompok etnis minoritas yang bermukim di Provinsi Jambi, yang paling tidak memiliki tiga nama: Orang Kubu, Orang Rimba dan Suku Anak Dalam. Melalui penelusuran nama ini terlihat bagaimana pola relasi kuasa yang secara historis terjadi antara kelompok minoritas etnis ini dengan kelompok etnis yang lebih besar yang lebih dominan serta dengan negara. Dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang ini, para peneliti, akademisi, aktifis sosial dan aparat negara; melakukan peran sebagai interlokutor yang penting dan mengukuhkan penggunaan nama-nama itu sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Sebagai sebuah kelompok etnis minoritas yang ruang kehidupannya, yaitu lingkungan hutan tropis Bukit Dua-Belas, yang telah banyak berubah karena dijadikan pemukiman transmigrasi dan perkebunan sawit. Karena posisinya yang lemah dalam hubungan dengan kelompok yang lebih dominan dan negara; dalam interaksi itu berlangsung proses marjinalisasi. Masa depan kelompok minoritas etnik ini prospeknya buruk dan hanya melalui uluran tangan yang tepat dari negara mereka akan terselamatkan dari kepunahan.

Kata kunci: Identitas, Marjinalisasi, Orang Rimba

ABSTRACT

This article, through the available literature, explores and problematising the shifting social and cultural identity of a minority ethnic group resided in the Province of Jambi, Sumatera; that at least has three names: Orang Kubu, Orang Rimba and Suku Anak Dalam (SAD). From the changes of their names reveal the pattern of power relation that is historically embedded within their interaction with the major ethnic groups and the state. In such an asymmetric power relationship contexts researchers, academicians, social activists and

¹ Tulisan ini semula merupakan bagian dari laporan penelitian tentang masyarakat adat yang dilakukan oleh Tim Penelitian LIPI tahun 2016.

state apparatuses; play their important roles as interlocutors and establishes the usage of names according to their own interests. As a minority ethnic group their livelihood which is closely related with tropical forest environment in Bukit Dua-Belas; have rapidly change as it converse into transmigration areas and palm oil plantations. The weak position in relation to the dominant ethnic groups and the state, the process of marginalisation occurred in the interaction. The prospect of this vulnerable ethnic minority group is bleak and their future only be saved through the proper affirmation action from the state.

Keywords: Identity, Marginalization, Jungle People

Pengusiran itu terjadi saat dua kelompok Orang Rimba tengah membangun *sudung* – hunian sederhana dari tonggak-tonggak kayu tanpa dinding dan hanya beratap terpal plastik – di areal perkebunan sawit, Kamis (2/6/2016). Kebun itu sebelumnya adalah hutan hunian Orang Rimba selama turun-menurun, jauh sebelum pemerintah mengalihfungsikan sebagai kebun sawit.

‘Komunitas Adat: Demi Sawit, Orang Rimba sempat Dianiaya’

(*Kompas*, Senin 6 Juni 2016)

Indigenous populations in most contemporary nation-states remain poor, lacking adequate health and education, at the mercy of predatory national and transnational agents of ‘development.’ The modest, but real, gains in control over land and resources achieved by native groups in recent years are fragile, always susceptible to reversal by overwhelmingly more powerful majority populations.

James Clifford, *Return*, (2013: 17)

PENGANTAR

Menulis tentang kelompok yang secara sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan; terlihat rentan mudah terjebak ke dalam romantisasi masa lalu yang tak mungkin kembali atau idealisasi masa depan yang sesungguhnya tak terjangkau. James Clifford (2013) dalam buku ketiga triloginya, ‘Return: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century’, menawarkan sebuah pendekatan yang dia sebut ‘realism’, yang pada intinya adalah upaya untuk menulis secara apa adanya dengan upaya menghindari jebakan yang terjadi ketika melukiskan gambaran tentang kelompok rentan, seperti ‘*indigenous population*’. Mencoba sejauh mungkin, menghindari jebakan itu, tulisan ini merupakan upaya untuk mengisahkan *predicament* dari sebuah kelompok penduduk yang karena

trajektori sejarah dan kondisi kehidupan yang dimilikinya selalu berada dalam posisi rentan karena secara terus-menerus mengalami proses marjinalisasi. Kelompok penduduk yang menjadi subyek tulisan ini diketahui secara turun-temurun menempati sebuah geografi yang saat ini secara administratif berada di dalam wilayah Provinsi Jambi di Pulau Sumatra.

Dari sejarah yang beredar, diketahui bahwa kelompok penduduk ini memiliki pola kehidupan yang sangat terikat dengan lingkungan hutan. Kelompok penduduk yang selalu berada di tubir proses modernisasi dan industrialisasi dari masyarakat Indonesia ini dipaksa untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, dan yang menarik, pada saat yang bersamaan berusaha melakukan resistensi, mempertahankan apa yang mereka miliki – termasuk identitas kultural (*cultural identity*) yang menjadikan mereka dikenali oleh orang di luar mereka, atau mengenali diri mereka sendiri; sebagai sebuah komunitas.

Identitas kultural yang melekat pada kelompok penduduk yang memiliki kebiasaan berburu dan meramu sebagai cara mempertahankan hidup ini, ternyata menjadi problematik tersendiri karena dalam prosesnya selalu merupakan hasil interaksi dengan pihak luar. Identitas kultural selalu bersangkutan dengan relasi-relasi sosial yang menyiratkan adanya peran kekuasaan di dalamnya. Dalam perjalanan waktu setidaknya-tidaknya ada tiga penyebutan terhadap kelompok penduduk yang selalu hidup secara berpindah-pindah ini; pertama mereka disebut sebagai 'Orang Kubu', kedua sebagai 'Orang Rimba' dan ketiga sebagai 'Suku Anak Dalam' (biasanya disingkat SAD). Ketiga penamaan terhadap kelompok penduduk yang hidupnya rentan ini, diduga mencerminkan adanya perbedaan dalam relasi sosial antara mereka dengan penduduk di sekitar mereka, dan dengan berbagai rezim pemerintahan, yang selalu berada dalam posisi mengatur mereka.

Melalui penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang telah ada dan observasi singkat di lapangan, tulisan ini mencoba melihat ketiga penamaan yang selalu muncul dalam berbagai tulisan, baik oleh para ahli dan peneliti melalui berbagai publikasi, dalam pemberitaan pers, juga dalam berbagai dokumen pemerintah dan seperti diucapkan oleh mereka sendiri. Bagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri, diperoleh melalui dialog dengan mereka dalam sebuah kunjungan secara singkat ke pemukiman mereka di Makekal Hulu, Kabupaten Bangko, Provinsi Jambi di akhir bulan Mei 2016. Selang dua hari setelah kunjungan ke Makekal Hulu itulah berita Kompas yang dikutip potongannya di atas terbaca. Berita singkat di Kompas itu, menyebut mereka sebagai Orang Rimba, sebutan yang juga saya dengar ketika saya berbicara dengan mereka di Makekal Hulu. Mereka tampaknya lebih terbiasa, dan kelihatannya lebih nyaman, menyebut diri mereka

sebagai Orang Rimba atau 'Orang Rimbo', daripada Orang Kubu atau Suku Anak Dalam.

Apapun penamaan terhadap mereka, Orang Kubu, Orang Rimba atau Suku Anak Dalam; satu hal yang tampaknya pasti adalah posisi mereka yang selalu rentan, secara sosial, ekonomi maupun politik dalam hubungannya dengan orang-orang di luar mereka, maupun dengan Negara dan pasar – sebagaimana digambarkan oleh James Clifford (2013: 17), dalam kutipan kedua di atas. Untuk sampai pada tujuan tulisan ini yaitu memperlihatkan proses dinamik dari adaptasi dan resistensi yang terus menerus dilakukan, sebelum masuk ke diskusi dari setiap penamaan, akan lebih dahulu diuraikan beberapa konsep yang dianggap relevan sebagai konteks dari penamaan atas identitas kultural dari kelompok rentan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas, '*Indigeneity*' dan Komunitas Adat

Indonesia, menurut Anderson (1991) adalah sebuah bangsa yang terbentuk bukan semata-mata karena sejarah masa lalu, namun lebih karena adanya imajinasi bersama akan sebuah komunitas yang memiliki masa depan bersama. Namun demikian, yang tampaknya dilupakan oleh Benedict Anderson dalam teorinya tentang '*imagined communities*' itu adalah adanya komunitas-komunitas kecil yang sepertinya tidak pernah ikut memiliki imajinasi tentang komunitas bersama itu. Komunitas-komunitas kecil itu, antara lain yang dialami oleh orang-orang yang secara turun-temurun hidup di belantara hutan Jambi ini, 'terpaksa' menjadi warga Bangsa Indonesia, tanpa mereka sadari. Keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas, tercermin dari identitas yang kemudian dikenakan kepada mereka melalui penyebutan nama mereka, 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' atau 'SAD'; pun bukan merupakan sesuatu yang berasal dari mereka sendiri, namun merupakan buah dari pertemuan mereka dengan orang lain dan dengan negara yang merasa berhak mengatur kehidupan mereka.

Sebagai sebuah kelompok yang kemudian dinilai oleh orang luar sebagai orang-orang yang secara turun-temurun, tanpa ada yang tahu secara pasti sejak kapan, hidup di hutan dan menjadikannya sangat bergantung pada hutan; mereka bisa digolongkan, atau mengklaim diri sebagai penduduk asli atau '*indigenous people*'. Sebagai penduduk asli, mereka sudah ada sebelum lahirnya bangsa dan negara yang bernama Indonesia – yang merasa memiliki monopoli atas wilayah hutan yang selama turun-temurun sesungguhnya menjadi wilayah – yang lagi-lagi oleh orang luar – dikatakan sebagai 'wilayah adat' mereka. Penyebutan identitas mereka, apakah sebagai 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' ataupun 'SAD'

memperlihatkan bahwa mereka, betapapun sederhananya, memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang kurang lebih sama, sebagai sebuah komunitas. Mereka memiliki cara hidupnya sendiri, seperti sistim mata pencaharian (*economic livelihood*), sistim kekerabatan (*kinship system*) maupun dalam sistem kepercayaan (*belief system*); dengan kata lain mereka memiliki adat-istiadatnya sendiri. Pada masa Orde Baru mereka digolongkan sebagai ‘Suku Terasing’ atau ‘Komunitas Adat Terpencil’ (KAT) dan pada masa pasca Orde Baru digolongkan sebagai Masyarakat Adat.

Taufik Abdullah (1966, footnote 3) mengutip Josselin de Jong, menyebut bahwa Adat “*used to denote the whole complex of custom, rules, beliefs and etiquette handed down by tradition from immemorial times...*”. Jadi, menurut Josselin de Jong, adat menunjuk pada keseluruhan kebiasaan, aturan-aturan, kepercayaan-kepercayaan dan etik (etiket) yang diturunkan oleh tradisi sejak dahulu kala. Di sinilah adat sebagai sebuah sistim dalam masyarakat erat kaitannya dengan ‘*indigeneity*’ atau keaslian sebuah masyarakat yang kemudian disebut sebagai masyarakat-masyarakat asli (*indigenous people*). Dalam kaitan dengan subyek yang menjadi fokus dalam tulisan ini, yaitu ‘Orang Kubu’, ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’ tampaknya konsep adat dan ‘*indigeneity*’ yang menjadi dasar eksistensi ‘*indigenous people*’ sebagaimana dikenal dalam literatur bisa diterapkan.

‘*Indigeneity*’ yang dianggap sebagai landasan untuk melakukan klaim sebagai ‘*indigenous people*’ memang problematik karena tidak bisa bersifat universal. ‘*Indigeneity*’ sebagai konsep tidak dapat dilepaskan dari sejarah masyarakat di mana komunitas yang mengklaim diri sebagai penduduk asli itu berada. James Clifford (2013) memperlihatkan ada trajektori yang berbeda yang membuat ‘*indigeneity*’ sesuatu yang bersifat ‘ambiguous’ jika diterapkan untuk komunitas-komunitas di Asia dan Afrika, seperti dikatakannya berikut ini:

The term ‘indigenous’ typically refers to societies that are relatively small-scale, people who sustain deep connections with a place. Applied to diverse communities, the name does not presume cultural similarity or essence but rather refers to comparable experiences of invasion, dispossession, resistance, and survival. Indigenous, in this definition, makes most sense in places like the Americas, Australia, the Island Pacific, and the Arctic. It is less relevant for most of Africa and much of Asia. Where settler-colonial histories are not sharply defined, it is difficult to identify unambiguous ‘first peoples.’ But elsewhere one finds clear examples of the indigenous as I use the term: Aborigines in Australia, Maori in Aotearoa/New Zealand, the Ainu of Hokkaido/Sakhalin, and the ‘Indian’ tribes of North and South America

Apa yang dikatakan oleh James Clifford, seorang ahli sejarah sekaligus antropologi, menunjukkan bahwa klaim sebagai penduduk asli (*indigenous people*) di Indonesia sesungguhnya problematis. Kontras yang ditunjukkan antara pengalaman kolonialisme di Amerika Utara dan Selatan, Kanada, Australia dan New Zealand, yang secara jelas memperlihatkan kontras antara ‘*settlers*’ dan ‘*indigenous people*’, dan proses kekerasan yang bersifat masif dalam bentuk invasi (*invasion*), perampasan (*dispossession*), dan resistensi (*resistance*), dan ‘*survival*’; tidak dialami dalam skala yang sama di Asia dan Afrika. Kita memang tahu bahwa penduduk di Asia dan Afrika yang dijajah oleh Barat, setelah perang dunia ke-2 berakhir pada tahun 1940-1950an, mengalami proses transformasi politik yang dalam literatur disebut sebagai ‘dekolonisasi’ dan menjadi negara-negara yang merdeka. Sementara itu kita tahu, apa yang dialami oleh penduduk ‘asli’ di Kanada, Benua Amerika, Australia dan Selandia Baru adalah sebuah proses genosida atau ‘*ethnic cleansing*’ yang menjadikan mereka (Indian di Amerika dan Kanada, Maori di Selandia Baru, Aborigin di Australia) menjadi minoritas yang hampir punah di tanahnya sendiri.

Dalam konteks Indonesia, konsep ‘*indigeneity*’ jelas menjadi bermasalah jika mengacu pada konsep ‘*indigeneity*’ yang dilahirkan dalam konteks pengalaman ‘*settlers*’ vs ‘*indigenous people*’ di Benua Amerika, Kanada, Australia dan Selandia Baru; karena setelah dekolonisasi Indonesia yang menjadi sebuah negara yang merdeka, dan Belanda sebagai ‘*settlers*’ berhasil diusir dari bumi yang cukup lama menjadi koloninya. ‘Orang Kubu’ atau ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’ secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia yang posisinya setara dengan Orang Jawa, Orang Sunda, Orang Batak, Orang Bugis, Orang Dayak, Orang Maluku maupun Orang Papua. Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa (*nation-state*) yang berdaulat dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks Indonesia ada istilah yang kemudian lahir, yaitu ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’, dimana yang digolongkan sebagai ‘non-pribumi’ adalah Orang-Orang Cina dan Arab, atau Eropa; yang masuk ke Indonesia sebagai migran, dan bukan sebagai ‘*settlers*’ yang melakukan invasi dan perampasan, sebagaimana dialami di Amerika, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Orang Cina dan Arab, dan sebagian kecil India dan Eropa; masuk ke Indonesia, umumnya sebagai pedagang atau penyebar agama. Keturunan Orang Cina dan Arab ini tidak sedikit yang terbukti ikut berjuang dalam proses dekolonisasi, sehingga harus dikatakan sesungguhnya istilah ‘non-pribumi’ sebagai sebuah kategori yang bersifat rasial, sesungguhnya tidak relevan lagi.

‘Orang Kubu’, atau ‘Orang Rimba’ atau ‘SAD’; dan orang-orang yang saat ini dianggap atau mengklaim sebagai ‘komunitas atau masyarakat adat’ jelas memiliki trajektori sejarah (*historical trajectory*) yang berbeda sekali dengan

Orang Indian, Orang Maori dan Orang Aborigin; meskipun seperti dikatakan oleh James Clifford (2013), merupakan kelompok masyarakat yang keberadaannya terus menerus mengalami mengalami proses marjinalisasi, seperti saya kutip di atas: *'Indigenous populations in most contemporary nation-states remain poor, lacking adequate health and education, at the mercy of predatory national and transnational agents of 'development.'* Disebut dengan nama apapun, 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' atau 'SAD', mereka menjadi warga negara dari negara-bangsa yang bernama Indonesia yang tetap miskin, jauh dari ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan; dan menjadi objek terus menerus dari agen-agen pembangunan, nasional maupun internasional.

Karena posisi dan kondisi yang nyaris mengenaskan seperti inilah, apapun sebutannya, 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' ataupun 'SAD', dipilih untuk diteliti. Mengapa, di tengah proses marjinalisasi yang massif, mereka tetap ada, dan mungkin dengan adat-istiadat yang semakin centang-perenang. Adat-istiadat kelompok ini jelas sangat berhubungan dengan lingkungan alam yang saat ini dapat diduga semakin hancur, yang membuat mereka tidak mungkin menjalankan adat-istiadat seperti yang diturunkan oleh leluhur mereka dulu ketika hutan masih luas dan utuh. *'Melangun'*, sebagai bagian dari ritual adat ketika ada anggota keluarga yang meninggal, dengan melakukan perjalanan jauh selama beberapa tahun sebelum kembali ke kampung asalnya; praktis tidak mungkin lagi dilakukan karena hutan semakin susut luasnya, dan sebagian besar telah menjadi hutan karet atau sawit.

Mengutip kembali kata-kata James Clifford, *'at the mercy of predatory national and transnational agents of 'development'*, betapa tepatnya ungkapan itu untuk apa yang sementara ini kita baca atau dengar tentang 'Orang Kubu', atau 'Orang Rimba' atau 'SAD'. Dari bacaan, maupun dari kunjungan pendek ke Jambi, dan bertemu dengan berbagai pihak yang menjadi narasumber, kita diinformasikan tentang tidak sedikitnya 'agen-agen pembangunan' di sekitar 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' atau 'SAD'. Dalam sebuah diskusi kelompok dari beberapa orang yang mewakili 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' atau 'SAD' tentang situasi yang sedang mereka hadapi, mereka menyebutkan dengan jelas, salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah fragmentasi yang mereka alami dan kesulitan untuk menyatukan pendapat sebagai akibat adanya perbedaan antar kelompok di antara mereka, yang masing-masing kelompok 'menjadi binaan' dari 'agen pembangunan' yang berbeda. 'Agen pembangunan' yang dimaksudkan dalam diskusi kelompok itu adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mempunyai wilayah dan kelompok binaannya masing-masing di dalam Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Persoalan fragmentasi ini kembali mengemuka dalam diskusi dan pembicaraan yang kemudian dilakukan di Makekal Hulu,

adanya perbedaan antara Sokola Rimba di satu pihak dan WARSI – sebuah LSM di Jambi, di pihak lain, tentang perlunya ‘wilayah adat’ atau tidak, dalam konteks ‘pembangunan’ di Taman Nasional Bukit Duabelas.

Diskursus tentang ‘komunitas adat’ atau ‘maasyarakat adat’ merupakan sebuah isu tersendiri yang saat ini terus berlangsung di antara para ahli maupun pegiat yang sesungguhnya sama-sama ingin mengangkat nasib kelompok-kelompok rentan menjadi lebih baik. Meskipun mengemukakan isu ini penting, namun untuk kepentingan tulisan ini sengaja tidak dipaparkan, dan bisa dibaca dalam tulisan kami yang lain yang berkaitan dengan ini.

Orang Kubu: Sisa-Sisa Penyebutan Masa Lalu?

Ketika di bangku sekolah dulu (tahun 60-70-an), kita diberitahu oleh guru atau kita baca sendiri di buku-buku pelajaran sejarah atau geografi, bahwa Orang Kubu adalah orang-orang yang tinggal di hutan-hutan pedalaman Jambi di pulau Sumatra. Mereka digambarkan sebagai tidak berbaju, laki-laknya hanya memakai cawat, dan perempuannya terlihat buah dadanya karena hanya memakai semacam kain sarung, yang biasanya terlihat lusuh. Lingkungan mereka berupa hutan belukar dan kalau tergambar ada semacam rumah, berupa gubug sangat sederhana dari bambu atau kayu dengan atap dari daun-daun kering. Biasanya mereka digambarkan membawa semacam tombak atau lembing, dengan hasil buruan berupa binatang hutan, seperti rusa atau kancil. Visualisasi ‘Orang Kubu’ seperti kita dengar dari guru atau kita baca dulu itu, ternyata masih bisa ditemukan hari ini, di Makekal Hulu, sekitar setengah jam saja naik motor melalui jalan tanah berlumpur, dari SPG (Satuan Pemukiman Transmigrasi G) di mana ‘modernitas’ seperti TV, rumah makan dan toko-toko yang menjual barang-barang komoditas kehidupan ‘modern’ sudah bisa didapatkan.

‘Orang Kubu’ sebagai penamaan terhadap kelompok masyarakat yang hidup dari berburu dan meramu dan hidup berpindah-pindah ini, jejaknya dapat diperoleh dari tulisan-tulisan awal yang mencoba mendeskripsikan siapa mereka ini. Dari literatur yang ada, tulisan-tulisan awal menggunakan kata ‘Orang Kubu’ atau ‘The Kubu’, misalnya oleh G.J. van Dongen, dan dilanjutkan oleh Paul Schebesta (Lihat Sandbukt,1984) Akademisi asing yang mungkin cukup berpengaruh dalam diskursus kontemporer tentang ‘Orang Kubu’ adalah Oyvind Sandbukt, orang Norwegia yang pertama kali datang ke Jambi sebagai peneliti. Karena simpatinya kepada masyarakat setempat, sejak awal tahun 1980-an Oyvind Sandbukt melanjutkan kegiatannya di Jambi sebagai bagian dari proyek bantuan di bidang konservasi yang didanai oleh Norwegia. Gambaran tentang Oyvind Sandbukt saya dapatkan lebih jelas dari tesis master Anne Erita Venåsen

Berta (2014), yang menyebutkan bahwa Oyvind Sandbukt adalah seorang antropolog, yang kehadiran awalnya di Jambi dilukiskannya sebagai berikut:

After his fieldwork with Orang Rimba for twelve months in 1979-- 80 as part of a research fellowship, his interest and engagement in this unique group triggered him to initiate a project that would help maintain their traditional lifestyle in a rapidly changing environment (Sandbukt, 1984). Sandbukt contacted the already existing NGO Warsi and encouraged them to start the Orang Rimba-project. And in 1998 RFN became a sponsor and partner in Warsi's work with OrangRimba (Warsi, 1999, 2013)

Yang menarik, dalam tulisan-tulisannya untuk penerbitan internasional, Oyvind Sandbukt memilih menggunakan istilah 'Orang Kubu' daripada 'Orang Rimba', begitu juga dengan ahli Belanda yang banyak menulis tentang 'indigenous people', tetap menggunakan istilah 'The Kubu'. Apa yang dilakukan oleh Sandbukt dan Persoon, dibenarkan oleh Steven Sager (2010: 4-5), dalam disertasinya tentang Orang Rimba, yang mengatakan:

In the anthropological literature, the Orang Rimba have traditionally been referred to as the Kubu, a regional Melayu exonym ascribed to mobile, animist peoples who live in the interior lowland forests of South Sumatra and Jambi. In the Malay language, the word Kubu can mean 'defensive fortification', 'entrenchment', or 'place of refuge'. While these peoples have a long history of economic and political affiliations with the Melayu through trade in forest products, most have traditionally attempted to limit their interactions and have developed strong cultural and ethnic boundaries to differentiate themselves, and maintain distance from the village. In the past, these boundaries served to maintain their culture, beliefs, and autonomy within the wider Melayu world. They also served to maintain their physical security in the face of slave raids and pandemic disease (smallpox, cholera), spread through upstream-downstream trade.

Selanjutnya, Sager (2010: 5) menyebutkan bahwa:

The term Kubu refers to the majority Islamic Melayu villagers's perceptions of the Orang Rimba as using the interior forests to resist inclusion in the larger Melayu social and Islamic religious world. As is the case with other Malay exonyms in the region (for instance Sakai), the term Kubu has negative connotations: 'uncivilized' or 'not yet developed' (belum maju), 'primitive' (primitif), 'dirty' (kotor/jorok), 'smelly' (bau), 'stupid' (bodoh), 'yet to acquire a religion' (belum punya agama). For most Orang Rimba, the term Kubu is strongly offensive. Following the Indonesian government, many now use the more politically correct Suku Anak Dalam or the abbreviated sanak, which means 'tribe of the interior forests'

Disertasi doktor Steven Sager (2008) memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang dinamika sejarah maupun sistim religi Orang Rimba. Pemilihan istilah Orang Rimba dan bukan Orang Kubu, yang dikatakannya lazim

dipakai dalam literatur antropologi; merupakan keputusan yang menarik karena memberikan perspektif yang baru. Menurut Sager, seperti terbaca dalam dua kutipan di atas, istilah 'Kubu' merupakan sebuah konstruksi sosial sebagai hasil dari relasinya dengan Orang Melayu yang merupakan penduduk mayoritas di wilayah Jambi. Istilah 'Kubu' jelas merupakan konstruksi sosial yang berperspektif Melayu. Dalam perspektif Orang Melayu, 'Kubu' pada intinya menggambarkan 'mereka yang defensif dan bersembunyi untuk mencari perlindungan dan rasa aman'. Dalam kutipan kedua, dalam perspektif Melayu, 'Kubu' lebih jauh dikonotasikan sebagai sesuatu yang serba rendah, kotor, jorok, bau, tidak beradab, bodoh, dan belum mengenal agama. Menurut Sager, penyebutan 'Kubu' bagi Orang Rimba sangat merendahkan, dan menurut Sager juga, itu pula yang mendorong pemerintah memilih istilah 'Suku Anak Dalam' daripada 'Kubu'.

Suku Anak Dalam (SAD): Penyebutan Baru Pemerintah Indonesia

Jika 'Kubu' merupakan konstruksi identitas yang berpangkal dari perspektif Orang Melayu yang secara sosio-demografis menempati posisi dominan dalam relasinya dengan Orang Rimba; penyebutan istilah 'Suku Anak Dalam,' sebagaimana dikatakan oleh Sager di atas, adalah konstruksi identitas bagi Orang Rimba yang berperspektif kuasa-resmi dari pemerintah atau negara. Jika 'Kubu' merupakan *'Malay's perspective of identity construction'*, SAD merupakan *'a state's perspective of identity construction'*. Kedua perspektif ini memposisikan Orang Rimba sebagai pihak yang inferior, *'sub-ordinated'*, objek, bukan subjek, dan menjadi target dari rekayasa sosial negara, dan boleh jadi 'proyek pengislaman' bagi para elit Melayu di Jambi. Perspektif yang berangkat dari posisi superior, negara maupun etnik mayoritas; sudah hampir pasti hampa akan apresiasi atau penghargaan dan rekognisi atau pengakuan terhadap segala sesuatu yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh Orang Rimba sendiri. Segala sesuatu itu bisa berupa hal-hal yang bersifat kasat mata, seperti sistim nilai dan sistim kepercayaan yang menjadi inti (*core*) dari identitas kultural Orang Rimba, maupun hal-hal yang bersifat fisik, seperti sistim perekonomian, penguasaan lahan dan hutan, dan hubungan-hubungan antara Orang Rimba dengan lingkungan alamnya. Segala sesuatu ini, baik yang kasat mata maupun yang jelas wujudnya; bisa disebut sebagai kebudayaan Orang Rimba.

Secara akademik, masih perlu dilacak sejak kapan persisnya istilah 'Suku Anak dalam' mulai dipakai, dan dengan alasan apa? Namun, barangkali tidak terlalu keliru untuk mempertimbangkan konteks diskursus yang berkembang pada era tahun 1970-an dan 1980-an, di kalangan ahli antropologi Indonesia, khususnya yang berada di sekitar Koentjaraningrat, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia. Sebagai seorang ahli Antropologi, bersama sejawatnya para

ahli ilmu sosial lain, seperti Fuad Hassan (Psikologi) dan Selo Sumardjan (Sosiologi) berupaya untuk membantu para ekonom-teknokrat 'melancarkan pembangunan nasional'. Jejak paradigma yang berperspektif 'antropologi terapan' dari Koentjaraningrat dapat dibaca di bukunya yang berjudul *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (1974). Antropologi yang mempelajari masyarakat sebagai sebuah entitas yang diandaikan masih memiliki keutuhan nilai-nilai kultural, memandang kelompok-kelompok etnik atau suku-bangsa sebagai domain kajian akademiknya. Salah satu buku penting yang ditulisnya adalah *Kebudayaan Jawa* (1984) dan bersama murid-muridnya, Koentjaraningrat, menulis tentang *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, dan pada tahun 1993 Koentjaraningrat menerbitkan buku *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Dalam buku terakhir inilah bisa dilihat bagaimana konstruksi sosial tentang komunitas-komunitas yang dianggap masih hidup dengan cara meramu dan berburu atau sebagai peladang berpindah, bahkan secara negatif disebut sebagai 'perambah hutan'; diposisikan secara sosio-kultural sebagai 'suku terasing' yang harus dibudayakan.

Pengategorian komunitas-komunitas yang secara geografis dianggap terisolasi dari masyarakat luas, seperti halnya Orang Rimba di pedalaman Jambi, ke dalam sebutan 'Suku Anak Dalam' tidak dapat dilepaskan dari pengaruh para ahli ilmu sosial, seperti Koentjaraningrat, yang mengkonstruksi mereka sebagai 'Suku Terasing'. Disadari atau tidak oleh Koentjaraningrat dan murid-muridnya, seperti Parsudi Suparlan dan Subur Budi Santoso; penyebutan tersebut adalah implikasi kebijakan yang kemudian dilakukan oleh berbagai departemen dan dinas yang wilayah kekuasaannya meliputi mereka yang dianggap 'Suku Terasing', seperti Departemen Sosial dan Departemen Transmigrasi. Sebagai respon terhadap kebutuhan yang ada, pada tahun 1993, Departemen Transmigrasi diubah namanya menjadi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dan Presiden Suharto mengangkat Siswono Yudohusodo sebagai menterinya. Sementara itu di Departemen Sosial mulai mengembangkan program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT). Kedua program pembangunan yang bersifat nasional ini, 'Pemukiman Perambah Hutan' dan 'Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing' menunjukkan dengan jelas bagaimana hasil kerja ilmu sosial, khususnya Antropologi, yang dipelopori Koentjaraningrat, diterapkan dalam program pembangunan.

Pemasukan Orang Rimba ke dalam kelompok Suku Anak dalam, terlihat dengan jelas pada SK Kepala Desa Tanah Garo ketika mengangkat Ketua dan Pengurus Masyarakat Adat Makekal Hulu, di mana dalam SK itu tertulis: "...mengangkat Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang berada di Desa Tanah Garo...". Penyeragaman komunitas-komunitas adat yang sudah pasti memiliki sejarah dan bahkan adat-istiadat dan sistem kepercayaan berbeda ke dalam sebuah

kategori sosial yang bersifat tunggal jelas memudahkan pemerintah untuk merancang program-programnya. Misalnya, bentuk dan desain rumah, akan seragam, tanpa membedakan apakah komunitas yang akan dimukimkan telah memiliki pengalaman tinggal di dalam sebuah rumah atau tidak. Bukanlah rahasia lagi, bahwa proyek pemukiman kembali pada umumnya gagal karena bagi Orang Rimba yang memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-pindah dalam alam bebas, tinggal di sebuah rumah yang sempit beratap seng, tidak mungkin membuat mereka nyaman. Dari wawancara dengan Orang rimba di Makekal Hulu, akhir Mei 2016, diperoleh informasi bahwa tidak sedikit rumah-rumah itu kemudian dijual kepada para pendatang, antara lain para migran dari Jawa, yang jumlahnya semakin banyak di Jambi.

Orang Rimba: Akankah menjadi lebih baik buat ‘Orang Rimbo’?

‘*Self-identification*’ atau penyebutan diri sebagai ‘Orang Rimbo’ mungkin sudah terjadi sejak lama, bahkan ketika Orang Melayu atau Orang Belanda memanggil mereka sebagai ‘Orang Kubu’. Cara menyebut identitas diri atau kelompok dengan nama tempat di mana mereka biasa tinggal adalah hal yang secara universal terjadi di komunitas-komunitas yang belum memiliki tradisi tulis dan secara geografis terisolasi sehingga interaksi dengan dunia luar masih terbatas. Dalam kasus Orang Rimbo bisa saja terdapat sub-komunitas yang mengidentifikasi diri dengan lokalitas yang lebih sempit, misalnya menyebut diri sebagai Orang Kedasung, Orang Makekal dan seterusnya. ‘Orang Rimbo’ adalah sebutan dalam bahasa lokal-Melayu, sementara ‘Orang Rimba’ adalah sebutan dalam bahasa Indonesia, kapan ‘translation’ itu pertama kali dilakukan tidaklah terlalu jelas. Satu hal yang jelas adalah dipopulerkannya sebutan Orang Rimba dalam pemberitaan media dan dalam publikasi-publikasi para akademisi dan aktivis LSM.

Seperti telah saya coba uraikan dalam tulisan yang lain (lihat Tirtosudarmo, 2016a) perhatian terhadap apa yang kemudian dikonstruksikan, terutama oleh para aktivis LSM, pada era tahun 1990-an, sebagai ‘Masyarakat Adat’ tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam, termasuk hutan tropis, di kalangan akademisi, aktivis NGO maupun para pengambil keputusan di negara-negara industri barat. Perhatian terhadap perlunya menjaga lingkungan yang kemudian bermuara pada gerakan lingkungan hidup yang bersifat global, berimbas pada meningkatnya perhatian pada komunitas-komunitas yang selama ini menggantungkan diri pada hutan. Indonesia dan Brazil adalah dua negara yang masih memiliki hutan tropis yang cukup luas dianggap perlu mendapatkan perhatian dari para pegiat lingkungan, yang umumnya berasal dari negara-negara maju di Barat. Menyelamatkan hutan tropis harus dilakukan secara serentak dengan menyelamatkan penduduk

asli yang selama ini hidup dari hutan. Dalam momen inilah gerakan lingkungan berhimpit dengan gerakan '*indigenous people*' yang selama ini terabaikan dan terpinggirkan karena praktek pembangunan yang didominasi oleh kepentingan modal dan pasar dan terbukti menjadi motor pembabatan hutan dan perluasan lahan perkebunan. Dalam kasus Indonesia, Bank Dunia yang memberikan bantuan kepada program transmigrasi menjadi sasaran kritik NGO internasional karena dinilai punya andil terhadap penggundulan hutan dan peminggiran komunitas-komunitas yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan.

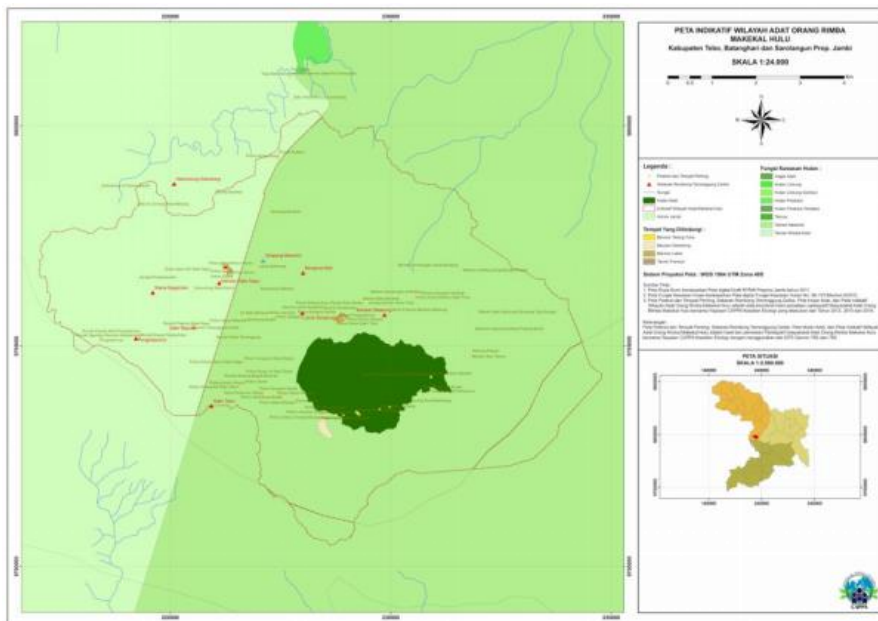
Dalam arus besar gerakan lingkungan dan '*indigenous people*' yang telah bersifat global ini, kisah Orang Rimba terbawa oleh arus besar ini ternyata sangat menarik. Secara sederhana agen-agen perubahan pada awalnya terdiri dari tiga pihak: WARSI, NORAD dan Oyvin Sandbukt. Koinsidensi antara kepentingan WARSI sebagai sebuah LSM yang memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan hidup, NORAD yang merepresentasikan kepentingan negara barat akan kelestarian planet bumi, serta simpati Oyvin Sandbukt yang mendalam terhadap nasib Orang Rimba menjadi trajektori tersendiri dalam proses adaptasi dan resistensi Orang Rimba terhadap perubahan-perubahan yang dialaminya.

Penggunaan istilah Orang Rimba yang diberikan oleh para aktivis dan para akademisi untuk menunjukkan identitas yang secara '*genuine*' juga dipilih oleh Orang Rimba sendiri mencerminkan harapan agar Orang Rimba diakui keberadaannya, dan dihargai hak-haknya sebagai sebuah komunitas sosial yang memiliki karakteristik khusus. Gerakan Masyarakat Adat yang dipelopori oleh AMAN sejak 1999 dan menjadi semakin penting posisinya dalam masa Presiden Jokowi saat ini, meningkatkan harapan baru bahwa nasib komunitas-komunitas telah lama termarjinalkan akan menjadi semakin baik. Kasus Orang Rimba yang tinggal secara terserak di kawasan TNBD – diduga jumlahnya tidak mencapai lima ribu jiwa, merupakan sebuah '*show case*': mungkinkah mereka bisa bertahan sebagai sebuah komunitas dalam persaingan yang tidakimbang dengan kekuatan modal yang hanya memikirkan keuntungan dan kebijakan negara yang juga menghasilkan peminggiran?

Sebagai sebuah '*show case*' Orang Rimba telah menarik banyak pihak; peneliti, aktivis, media dan artis, terlibat dalam advokasi maupun komodifikasi keberadaan Orang Rimba. Komodifikasi dan advokasi seringkali sangat tipis bedanya, dan tidak jarang keduanya berjalan seiring; dengan hasil yang bisa baik atau buruk bagi Orang Rimba sendiri. Representasi dan mis-representasi; serta apropriasi dan mis-apropriasi tentang Orang Rimba dan identitas kulturalnya; diduga akan terus berlangsung; yang sedikit atau banyak akan

mempengaruhi Orang Rimba sendiri dalam mereproduksi identitas kulturalnya sendiri sebagai tanggapannya terhadap dinamika internal maupun eksternalnya sebagai komunitas.

Realitas Orang Rimba hari ini jelas berbeda dengan ketika mereka masih disebut Orang Kubu yang dianggap kotor dan bodoh namun sesungguhnya masih dapat melangun dengan leluasa. Saat ini Orang Rimba dipaksa untuk keluar dari Rimba yang mencerminkan *predicament*-nya sendiri. Dari beberapa observasi dan wawancara singkat dengan Orang Rimba di Makekal Hulu, diperkuat oleh beberapa analisis yang dibuat oleh para akademisi dan aktivis yang lebih lama meneliti dan mendampingi Orang Rimba; dapat dikatakan bahwa para pemimpin dan generasi baru Orang Rimba telah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang posisi yang dimiliki dan tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi dan jalan mana yang harus ditempuh menghadapi masa depannya. Sejarah panjang sebagai komunitas yang selalu dalam posisi rentan sesungguhnya telah mengajarkan bagaimana mereka melakukan negosiasi sebagai resultante adaptasi dan resistensi terhadap perubahan dan dalam menghadapi 'agen-agen pembangunan' dari luar.



Sumber: KMB dan Sokola Rimba - 2016

Gambar 1.
Peta Indikatif Wilayah Adat Orang Rimba
(Dibuat berdasarkan kerjasama CAPP, KMB dan Sokola Rimba - 2016)

Pada saat ini Orang Rimba di Makekal Hulu telah membentuk organisasi yang bernama Kelompok Makekal Bersatu (KMB). Salah satu agenda yang sedang diperjuangkan oleh KMB dengan dibantu oleh Sokola Rimba dan CAPPa adalah diakuinya wilayah adat Orang Rimba. Salah satu hasil yang telah dicapai adalah sebuah peta indikatif yang menunjukkan letak dan batas-batas wilayah adat dari Orang Rimba (Gambar 1). Sejauh mana perjuangan KMB sebagai organisasi yang mewakili Orang Rimba di Makekal Hulu untuk mewujudkan wilayah adat yang diimpikannya, merupakan pertanyaan yang perlu dicari jawabnya. Dalam konteks ini, keterlibatan berbagai aktor lain, seperti LSM, baik yang mendukung atau yang menolak perlunya wilayah adat, lembaga donor, pemerintah daerah maupun pusat, perusahaan-perusahaan perkebunan besar maupun kecil, serta tidak kalah pentingnya para peneliti maupun akademisi yang melakukan studi tentang Orang Rimba; perlu dilihat dan diteliti. Nasib Orang Rimba yang berada di tubir modernisasi dan proses marjinalisasi yang terus berlangsung semestinya menjadi perhatian semua pihak untuk membantu keluar dari *predicament* yang selama ini melilitnya.

PENUTUP

Identitas dan Ruang yang Terampas

Identitas kultural berbeda yang diberikan pada sekelompok orang yang sama, dapat mencerminkan perbedaan kondisi yang dialami sekelompok orang tersebut pada masa yang berbeda. 'Orang Kubu' merupakan penyebutan yang mungkin mulai jarang digunakan ketika pemerintahan Indonesia memasuki sebuah periode yang disebut sebagai Orde Baru pada tahun 1970-an. Sebelum itu, kehidupan kelompok ini bisa dikatakan belum banyak terjamah oleh apa yang dikenal sebagai 'pembangunan'. 'Suku Anak Dalam' bisa dikatakan adalah identitas baru yang secara resmi dipergunakan oleh pemerintah, sejak Orde Baru. Sementara itu sebutan Orang Rimba banyak dipergunakan oleh kangan aktivis dan akademisi paska Orde Baru. Secara teoretis sesungguhnya hal semacam ini sesuatu yang lazim, karena identitas hampir selalu tidak pernah tunggal tetapi jamak – *'multiple identities'*.

Berdasarkan penelusuran literatur, sebutan 'Orang Kubu' tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelompok ini di antara mayoritas penduduk di kawasan Sumatera bagian Tengah dan Timur, yang kemudian menjadi Provinsi Jambi; yaitu Orang Melayu. Keberadaan kelompok ini di dalam hutan, di daerah pedalaman, di hulu sungai; sementara Orang Melayu berada di luar hutan, di dusun dan perkotaan, di daerah hilir sungai; menjadikan keduanya dalam posisi yang berseberangan, dikotomis dan oposisional. Ketika itulah istilah Orang kubu

mulai dipakai, terutama oleh Orang Melayu yang melihat kelompok ini sebagai kelompok dari orang-orang ‘udik’, ‘kotor’, dan ‘belum beragama’.

Memasuki rezim Orde Baru, berbagai perubahan yang bersifat struktural mulai dialami oleh kelompok yang dianggap terbelakang ini: penebangan hutan (resmi atau tidak resmi), transmigrasi, relokasi, perkebunan tanaman keras (karet dan sawit). Istilah suku terasing mulai dikenakan pada kelompok-kelompok yang dianggap hidup secara terisolasi dengan cara bercocok tanam yang dianggap buruk, yaitu berladang secara berpindah-pindah (*slash and burnt agriculture*). Dengan alasan untuk membuat mereka menjadi lebih beradab, dilakukan program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) oleh Departemen Sosial. Sementara itu dibawah Departemen Transmigrasi, dilakukan apa yang dikenal sebagai Transmigrasi Lokal yang bertujuan merumahkan penduduk setempat yang hidup terpencar.

Penggunaan istilah Suku Anak Dalam (SAD) tampaknya diprakarsai oleh pemerintah ketika harus menggolongkan komunitas-komunitas yang sesungguhnya memiliki sebutan sendiri-sendiri di wilayah Provinsi Jambi. SAD oleh karena itu sebetulnya sebuah istilah yang bersifat generik, yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok seperti: Orang Rimba, Orang Batin Sembilan, dan lain-lain. Pemerintah tampaknya tidak mau repot untuk melihat adanya perbedaan yang ada di antara komunitas-komunitas yang hidup secara terpencar-pencar di wilayah yang semula hutan primer yang kemudian berubah menjadi kavling-kavling HPH, HTI dan lokasi pemukiman transmigrasi. Mereka yang disebut sebagai SAD oleh karena itu merupakan sasaran dan target dari berbagai program pemerintah, terutama yang berupa upaya untuk menjadikan mereka penduduk yang bersifat menetap dengan disediakan perumahan ala kadarnya – jauh dari layak, yang sama sekali tidak mungkin membuat orang yang biasa hidup di lingkungan alam bebas secara berpindah-pindah, bisa hidup dengan tenang.

Sejalan dengan perubahan politik paska Orde Baru, gerakan LSM yang melakukan advokasi terhadap masyarakat-masyarakat yang dianggap menjadi korban pembangunan Orde Baru semakin besar pengaruhnya. Pada tahun 1999 dibentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berusaha menyatukan komunitas-komunitas yang selama ini dianggap ‘terasing’ dan ‘terpencil’ namun sesungguhnya memiliki adat-istiadatnya sendiri yang menjadikan mereka dapat disebut sebagai ‘Masyarakat Adat’.

Akhirnya, kita perlu melihat Jambi sebagai sebuah ruang ekonomi (*economic space*) yang relatif masih terbuka karena tingkat kepadatan penduduknya yang rendah, menjadikannya sebagai daerah *frontier* (*frontier areas*) yang selalu menarik para migran dengan latar belakang yang berbeda

(Minangkabau, Melayu Riau, Melayu Palembang, Jawa, Cina, Aceh, Batak, Banjar, Bugis, Madura dan lain-lain). Dalam konfigurasi dan lanskap sosio-kultural Jambi sebagai daerah *frontier* dengan penduduk yang bersifat multi-etnik semacam inilah posisi marjinalitas dan proses peminggiran Orang Rimba perlu dipahami.

Apa yang dikatakan James Clifford yang dikutip di awal tulisan ini, tampaknya perlu kita ingat: '*The modest, but real, gains in control over land and resources achieved by native groups in recent years are fragile, always susceptible to reversal by overwhelmingly more powerful majority populations*'. Proses peminggiran akan membuat penguasaan terhadap lingkungan hutan yang menjadi habitat dan sumber penghidupannya semakin menyempit dan identitas kultural mereka sebagai Orang Rimba pun akan semakin terkikis. Orang Rimba adalah bagian dari kaum pinggiran di negeri ini, seperti halnya Orang Baduy dan Orang Samin di Pulau Jawa. Sebagai komunitas, mereka terancam punah jika penguasaan atas tanah yang menjadi bagian penting dari ruang kehidupan (*life space*) yang memungkinkan mereka mengekspresikan identitas kulturalnya, terampas.

Seperti dikemukakan dalam pengantar tulisan ini, tema penelitian yang menjadi kerangka tulisan ini adalah 'adaptasi dan resistensi komunitas adat terhadap modernisasi dan industrialisasi'. Adaptasi dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan sosial budaya untuk menyesuaikan struktur dan kultur yang dimiliki terhadap pengaruh baik dari dalam maupun luar komunitas tersebut. Sedangkan resistensi adalah kemampuan sosial budaya untuk mempertahankan struktur dan kultur yang dimiliki komunitas adat tersebut terhadap pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Perubahan penamaan terhadap komunitas adat yang tinggal di Jambi, 'Orang Kubu', 'Orang Rimba' dan 'Suku Anak dalam'; yang mencerminkan relasi kekuasaan yang dialami oleh komunitas adat ini dengan pihak luar, sekaligus menggambarkan bagaimana identitas mereka sebagai sebuah kelompok, dibentuk melalui proses adaptasi dan resistensi terhadap pengaruh baik yang berasal dari dalam maupun dari dalam komunitas mereka.

Kemampuan sosial-budaya untuk menyesuaikan (adaptasi) dan mempertahankan (resistensi) struktur (khususnya dalam kaitan dengan penguasaan atas tanah, sistem mata pencaharian yang bergantung pada hutan serta pola pemukiman) maupun kultur (khususnya berkaitan dengan sistem kepercayaan dan kosmologi yang bersumber pada lingkungan alam) berlangsung dalam hubungan kekuasaan yang bersifat asimetris dengan pihak luar, baik dengan masyarakat sekitar (Orang Melayu), dengan pemerintah, maupun dengan perusahaan perkebunan yang sangat ekspansif perkembangannya sejak masa Orde Baru. Kemampuan resistensi yang sangat rendah dan adaptasi yang dilakukan dengan terpaksa, menjadikan komunitas adat ini menjadi tercerai-berai secara geografis dan terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik.

Sebuah puisi dari Jumardi Putra, di bawah ini, melukiskan kegalauan yang sedang dialaminya, mungkin ketika melihat ruang kehidupan (*life space*) Jambi yang memang semakin tidak ramah lagi. Tapi ke mana hendak melangkah?

Kampung Ini Tak Menarik Lagi

Kampung ini tak menarik lagi.

Dilumuti rabun. Apakah yang lain juga seperti dirinya?

Mereka berpangku tangan dengan pikiran dan perut yang berisikan serakah.

Mereka tak ingin wajahnya diterkam anjing yang menjaga sang tuan dari segala macam tudingan.

Kampung ini tak menarik lagi.

Tak ada lagi yang menekuni akar, sebab akar dicabut paksa dengan cara tak wajar.

Hanya ada perut-perut yang menjadikannya kuburan bagi yang lain.

Kampung ini tak menarik lagi.

Hanya ada pikun, tumpul, mandul, lengah, lelah, lemah, dan patah.

Kemana hendak melangkah?

REFERENSI

Abdullah, Taufik. (1966). *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau, Indonesia*, Volume 2, October, pp. 1-24.

Abid, Muhamad Husnul. (2015). "Kontestasi Kemelayuan: Islam Transnasional, Adat, dan Pencarian Identitas Melayu Jambi", dalam Ahnaf, Mohammad Iqbal (ed.). 2015. *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, pp. 173-206

Anderson, Benedict. (1993). *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Anindita, Aditya Dipta. (2006). "Memaknai 'Keberadaban': Studi Etnografi Kritis Pemaknaan Bujang Orang Rimba atas Label dan Stereotip Media Massa", *Tesis Magister Sains Ilmu Komunikasi*, Universitas Indonesia.

Berta, Anne Erita Venåsen. (2014). "People of the Jungle: *Adat, Women and Change among Orang Rimba*", *Master Thesis* submitted to the Department of Social Anthropology, University of Oslo.

- Clifford, James. (2013). *Return: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century*, Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press.
- de Jong, P. E. de Josselin. (1951). "Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia", *Dissertation*, The Netherland: Leiden University.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Penerbit: Gramedia
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, (ed.). (1988). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Koentjaraningrat, (ed.). (1993). *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Prasetijo, Adi. (2011). *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Prasetijo, Adi. (2015). *Orang Rimba: True Custodian of the Forest: Alternative Strategies and Actions in Social Movement Against Hegemony*, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development and Komunitas Konservasi Indonesia Warsi
- Rokhdian, Dodi. (2011). "Alim Rajo Disembah, Piado Alim Rajo Disanggah: Ragam Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi", *Tesis Magister Sains Ilmu Antropologi*, Universitas Indonesia.
- Sager, Steven. (2008). "The Sky is Our Roof, The Earth Our Floor: Orang Rimba Customs and Religion in Bukit Dua Belas Region of Jambi". *Unpublished PhD thesis*, The Australian National University.
- Sandbukt, Oyvind. (1984). "Kubu Conception of Reality", *Asian Folklore Studies*, Tokyo: Kenkyusha Printing.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (1993), "Dimensi Sosio-Ekonomi dan Implikasi Kebijakan Pemukiman Perambah Hutan", *Populasi*, Volume 4, Nomor 2, pp. 1-12.
- Tirtosudarmo, Riwanto (2015). "Menempatkan Orang Baduy dan Orang Samin Dalam Konteks Masyarakat Adat", Bab 2 dalam Laporan Penelitian Adaptasi dan resistensi Komunitas Adat, LIPI.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (2016). "From Suku Terasing to Masyarakat Adat: An Evolution of a Mobile Term", Paper for Symposium of Indonesian Anthropology, UI Depok, 25-28 July 2016.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (2016). "Problematizing inclusivity and inequality of *Masyarakat Adat*: The Power-Knowledge Nexus", Paper presented at the International Conference on 'How Indonesia works: Governance, Democracy and Citizenship', organized by KITLV, SPIN Program and University of Gajah Mada, Yogyakarta 12-13 December 2016.

Post Script

Saya menyelesaikan tulisan di atas sekitar bulan Juli 2016, dan sejak tulisan itu saya anggap 'selesai' saya tidak melakukan apa-apa terkait penelitian Orang Rimba di Jambi. Beberapa kali ingin melakukan kunjungan lagi untuk melihat perkembangan yang terjadi dengan Orang Rimba, karena beberapa kendala, rencana itu belum terlaksana. Pengetahuan saya tentang Orang Rimba masih sangat terbatas, selain hanya dari bacaan yang sesungguhnya belum dibaca secara tuntas, penelitian lapangan yang dilakukan juga masih menghasilkan pengamatan yang dangkal, tidak mendalam; dan tidak bisa untuk mengambil kesimpulan bagaimana proses adaptasi dan resistensi Orang Rimba yang menjadi tujuan penelitian. Kalau ada semacam '*conviction*' tentang Orang Rimba adalah keadaan yang umumnya rentan, dan proses marjinalisasi yang terus mereka alami. Tentu, tidak semua orang Rimba bernasib buruk, tetapi bisa dikatakan bahwa pada umumnya mereka terus terpinggirkan, dan dalam posisi mencoba bertahan terhadap berbagai pilihan yang pada umumnya tidak menguntungkan.

Sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 secara berturut-turut Harian Kompas kembali melaporkan kabar buruk tentang Orang Rimba dari Jambi. Beberapa laporan Kompas yang sempat saya baca antara lain, Kompas tanggal 13 Oktober 2016, di halaman 1, dengan judul: 'Kemanusiaan: Orang Rimba Minta Perlindungan Negara'. Dalam laporan wartawan Kompas ini diberitakan tentang pengusiran-pengusiran yang dialami Orang Rimba oleh sejumlah 'pemegang konsesi kebun dan tanaman industri'. Dalam lima bulan terakhir, telah terjadi dua kali pengusiran. Menurut catatan Kompas, hingga tanggal 12 Oktober 2016 sekitar 600 warga Orang Rimba masih berada di pengungsian setelah diusir oleh pekerja PT. Wana Perintis dari areal kerja Hutan Tanaman Industri (HTI) karet. Setelah diusir, Orang Rimba ini untuk sementara tinggal di hunian sederhana beratap terpal, beralaskan jalinan dahan kayu, tanpa dinding; yang disebut oleh Orang Rimba sebagai 'sudung'. Di pengungsian ini Orang Rimba banyak yang mengalami kelaparan. Diantara pengungsi ini terdapat 50 anak-anak yang berusia lima tahun dan tidak sedikit yang mengalami demam.

Pada tanggal 15 Oktober 2016, *Kompas* kembali melaporkan kondisi 600 Orang Rimba yang berada di pengungsian yang terletak di Desa Jelutih, Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari. Dilaporkan oleh Kompas, sekitar lima orang anak balita dalam kondisi demam, belasan warga sakit infeksi saluran pernafasan akut, hipotensi (tekanan darah rendah), rematik, dan sakit kulit; namun mereka tidak bisa keluar tempat pengungsian untuk berobat. Para pengungsi ini menurut laporan Kompas berada dalam suasana ketakutan, karena ancaman yang mereka terima dari petugas keamanan PT. Wana Perintis. Salah seorang pengungsi berkata: *Ake* ketakutan (saya ketakutan). *Benyok* (banyak) orang di atas, hadang

ake pakai kampak dan golok'. Untuk menuju puskesmas terdekat yang berjarak 50 km dari rimba itu, mereka harus melewati sekelompok orang bersenjata tajam yang berjaga-jaga di batas hutan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Mereka menghadang Orang Rimba yang hendak melintas. Pengusiran Orang rimba ini berawal sejak tanggal 8 Oktober 2016, ketika puluhan orang mengobrak-abrik hunian yang sama hampir setahun mereka tempati sebagai hasil kesepakatan yang ditandatangani langsung wakil dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pihak PT. Wana perintis, dan perwakilan Orang Rimba.

Oleh *Kompas* (15 Oktober 2016) diberitakan bahwa Manajer Lapangan PT. Wana Perintis Binsar Nainggolan menyangkal adanya pengusiran. Aktivitas pekerja, menurut dia, hanya untuk membersihkan lahan karet yang dipanen awal tahun depan. Ia mengatakan, keberadaan Orang Rimba di sana mengganggu aktivitas pekerja dan menyebut tidak ada legalitas bagi mereka mengelola kebun karet. 'Yang ada baru berupa kesepakatan, belum ada surat keputusan', kata Binsar. Kesepakatan yang tidak tertulis, dimana isinya memberikan 114 hektar untuk hunian dan sumber kehidupan bagi Orang Rimba dalam skema perhutanan sosial hutan kemitraan, seperti telah disebutkan diatas, rupanya menjadi alasan bagi pihak perusahaan untuk melakukan pengusiran terhadap Orang Rimba yang telah bermukim sekitar satu tahun itu. Kemungkinan besar akibat pemberitaan media massa, terutama Kompas yang secara berturut menjadikan peristiwa pengusiran Orang rimba sebagai 'headline' mendorong pihak pemerintah untuk segera menangani persoalan yang terjadi. Cepatnya, reaksi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, kemungkinan juga karena permintaan pihak istana, karena Presiden Jokowi telah berjanji mencari solusi bagi Orang Rimba dalam kunjungannya ke pemukiman Orang Rimba, sekitar setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2015.

Menurut laporan *Kompas*, pada hari Kamis 13 Oktober 2016, terjadi kesepakatan baru, Orang Rimba yang terusir dan mengungsi, berdasarkan kesepakatan baru ini diperbolehkan kembali menempati areal 114 hektar yang sebelumnya telah mereka tempati. Kesepakatan baru itu juga menyebutkan bahwa pihak perusahaan akan memberi sanksi kepada 'oknum pekerja' yang telah melakukan intimidasi dan tindak kekerasan kepada Orang Rimba. Membaca berita terakhir ini, ada kelegaan, karena para pengungsi ini diperbolehkan kembali, namun kita tahu bahwa nasib Orang Rimba tetap ditubir kemiskinan dan ketidakpastian akan masa depan. Orang Rimba, akan terus termajinalisasi jika negara tidak turun tangan dan melakukan kebijakan afirmatif (*affirmative astion*) yang tepat.